



Buku Sertifikat Ekonomi Indonesia (BSEI)
Cakupan: Seluruh Wilayah Indonesia
www.perbanas.ac.id

PROSIDING Simposium Riset Ekonomi VI - 2014



PERKEMBANGAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2008 - 2012 (THE PROGRESS OF THE DISTRICT AND CITY FINANCIAL INDEPENDENCE IN SOUTH EAST NUSA PROVINCE ON THE PERIOD 2008 - 2012)

Adelia Putri
Gregorius Nasiansenus Masdjojo
Fakultas Ekonomi Universitas STIKUBANK

ABSTRACT

The regional autonomy which included fiscal decentralization requires having financial independence. Fiscal decentralization will give authority to the local government to explore the potential of the area and obtain the transfer of the center in terms of fiscal balance. Source of funds used for the construction consists of Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Revenue Sharing. The object of this research is South East Nusa Province. This study aimed to analyze the influence of Local Revenue growth, General Allocation Fund growth, Special Allocation Fund growth and Revenue Sharing growth to Local Financial Independence. Based on calculation with panel data regression is found that Local Revenue growth has positive and significant impact on Local Financial Independence, General Allocation Fund growth has negative and significant impact on Local Financial Independence, Special Allocation Fund growth has negative and significant impact on Local Financial Independence, Revenue Sharing growth has not significant impact on Local Financial Independence.

Key words : Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing, Local Financial Independence

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang semula berorientasi sentralistik menjadi desentralistik dan menjalankan otonomi. Pelaksanaan Undang-Undang diatas telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dikenal dengan otonomi daerah. Konsekuensi dari otonomi daerah menjadikan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah akan semakin besar, sehingga tanggung jawab yang diemban juga akan bertambah banyak.

Dalam upaya mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah telah melaksanakan pembangunan secara bertahap dan berencana. Dalam mencapai program pembangunan, maka pembiayaan untuk sektor pemerintahan sangat dibutuhkan dan tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Sumber dana yang dapat dipakai dalam



Badan Nasional Ekonomi Indonesia (BNEI)
Calong Wakil Rakyat Kabupaten Lingsar 1 Tahun

PROSIDING Simposium Riset Ekonomi VI - 2014



pembangunan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain - lain Pendapatan Daerah yang sah.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 21 kabupaten/kota yang didalamnya memiliki ciri khas dan potensi unik pada masing-masing daerahnya. Disetiap daerah yang ada seharusnya dapat dikembangkan lebih lagi secara lebih optimal dengan meningkatkan pengolahan akan sumber daya alam alami yang ada pada masing-masing daerah. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luas dan beranekaragam, baik dalam segi pertanian, perkebunan, perikanan, tambang, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data APBD Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur diantara tahun 2008-2012 menunjukkan suatu fakta yang memprihatinkan yaitu sebagian besar Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur rasio DAU terhadap Total Pendapatan Daerah melebihi 50%. Artinya keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada transfer pemerintah pusat atau dengan kata lain terdapat kondisi ketidakmandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
2. Apakah pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
3. Apakah pertumbuhan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
4. Apakah pertumbuhan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

2. RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari asli Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antarbidang.



Stasiun Telekomunikasi Indonesia (STIE)
Perbanas

PROSIDING

Simposium Riset Ekonomi VI - 2014



www.perbanas.ac.id

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kajian Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Purwo Susilo (2009), memberikan informasi bahwa hasil analisis pengaruh pajak daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kapasitas fiskal, hasil analisis retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal, dana bagi hasil berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kapasitas fiskal, dan PDRB Jasa mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal.

Menurut Rudi (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan pada hasil penelitiannya menunjukkan indikasi bahwa adanya kecenderungan daerah untuk mempertahankan (bahkan meningkatkan) transfer dana dari pemerintah pusat yang jumlahnya semakin besar.

Menurut Ayu (2007) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah selama kurun waktu penelitian. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yunita (2008) dalam penelitiannya menguji apakah rasio efektivitas DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan variabel rasio efektivitas DAU berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Haryanto (2005) dalam penelitiannya yang berjudul "Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif dengan Metode Path Analysis" menganalisis kemandirian keuangan provinsi di Indonesia. Dalam penelitiannya mengemukakan proxy yang digunakan untuk mengukur Kemandirian Keuangan Daerah yaitu Kapasitas Fiskal yang terdiri dari variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRB Jasa dan Bagi Hasil Pajak. Dari penelitiannya diketahui bahwa variabel yang mempengaruhi secara positif signifikan terhadap kapasitas fiskal yaitu Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak.

Menurut Muliana (2009) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap variabel tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah sampel yang diteliti oleh Muliana masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan total jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, selain itu periode yang diteliti juga hanya pada tahun 2006.

Hipotesis

Sesuai dengan tujuan penelitian, kajian teoritis dan beberapa penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah :



H1 : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

H2 : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

H3 : Pertumbuhan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

H4 : Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

H5 : Pertumbuhan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

3. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian dan Sumber Data

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel sensus sehingga didapatkan sampel sebanyak total dari jumlah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur dengan data panel mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dari tahun 2008-2012.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder panel, yaitu gabungan data time series dan cross section dari periode tahun 2008 sampai dengan 2012 (lima tahun). Sumber data yang diperoleh melalui lembaga-lembaga pemerintah yang resmi tersebut dari berbagai publikasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

Persamaan Matematis

Untuk membuktikan hipotesis diatas, dapat dibuat persamaan matematis sebagai berikut :

$$KKD = \alpha + \beta_1 \Delta PAD + \beta_2 \Delta DAU + \beta_3 \Delta DAK3 + \beta_4 \Delta DBH + \epsilon$$

KKD = Kemandirian Keuangan Daerah

ΔPAD = Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

ΔDAU = Pertumbuhan Dana Alokasi Umum

ΔDAK = Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus

ΔDBH = Pertumbuhan Dana Bagi Hasil

α = intersep

β_1-4 = koefisien regresi variabel independen

ϵ = error term

Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

- 1) Uji Normalitas (Skewness dan Kurtosis)
- 2) Uji Asumsi Klasik (Multikolinearitas, Autokorelasi, Heterokedastisitas)
- 3) Uji Pemilihan Model (menggunakan regresi data panel (OLS, FEM, REM, Uji Chow dan Uji Hausman)
- 4) Uji Keباikan Suai (Uji Adjusted R Square dan Uji Anova)
- 5) Uji Hipotesis (Uji T)



4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan software SPSS versi 20 dan EViews 7 diperoleh olahan sebagai berikut :

Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis *skewness* dan *kurtosis*.

Tabel 1. Uji Normalitas1

	N	Skewness		Kurtosis	
		Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
ZRE	105	5,046	0,236	43,295	0,467
Valid N	105				

Dari hasil diatas, dapat diketahui bahwa hasil nilai *Skewness* = $5,046/0,236 = 21,381$, dan nilai *Kurtosis* = $43,295/0,467 = 92,709$. Dari kedua nilai tersebut, dapat diketahui bahwa data yang dipunyai masih belum normal karena data masih lebih besar dari 1,96.

Untuk agar dapat menormalkan data, maka perlu di buang data-data yang memiliki nilai residual diatas 2,5. Data yang memiliki nilai residual diatas 2,5 adalah Kota Kupang pada tahun 2008, 2009, 2010 dan Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2011. Setelah membuang keempat data tersebut, dilakukan uji normalitas kembali. Hasil yang didapat setelah dilakukan uji normalitas kembali adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Uji Normalitas2

	N	Skewness		Kurtosis	
		Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
ZRE	101	-0,335	0,240	-0,183	0,476
Valid N	101				

Dari hasil diatas, dapat diketahui bahwa hasil nilai *Skewness* = $0,335/0,240 = 1,396$ dan nilai *Kurtosis* = $0,183/0,476 = 0,38$. Dari kedua nilai tersebut, dapat diketahui bahwa data yang dipunyai sudah normal karena data sudah lebih kecil dari 1,96.

Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji model yang digunakan apakah memenuhi asumsi klasik, perlu dilakukan 3 macam uji asumsi klasik yaitu autokorelasi, multikolinearitas dan heterokedastisitas.

Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independent. Hasil yang didapat setelah dilakukan uji multikolinearitas adalah sebagai berikut :



Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	lpad	0,485	2,061
	ldau	0,434	2,304
	ldak	0,488	2,05
	ldbh	0,558	1,792

a. Dependent Variable: mandiri /

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai tolerance value berada diatas 0,1 dan nilai VIF berada dibawah 10. Dengan demikian berarti bahwa model yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas.

Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi.

Hasil yang didapat setelah dilakukan uji autokorelasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,893 ^a	0,798	0,79	0,02476	2,084

a. Predictors: (Constant), ldbh, ldau, ldak, lpad

b. Dependent Variable: mandiri

Dari hasil diatas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson adalah 2,064. Nilai tersebut berada diantara -2 dan 2. Jadi dapat dikatakan bahwa model yang digunakan terdapat autokorelasi.

Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Hasil yang didapat setelah dilakukan uji heterokedastisitas adalah :



Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,048	0,042		1,154	0,251
	Lpad	0,007	0,004	0,388	1,787	0,077
	Ldau	-0,04	0,008	-1,276	4,226	0,07
	Ldak	0,019	0,005	0,582	3,584	0,061
	Ldbh	0,009	0,005	0,237	1,916	0,058

Dari hasil diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05. Oleh karena itu maka model yang digunakan tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Pemilihan Model

Estimasi model Kemandirian Keuangan Daerah menggunakan analisis regresi data panel dapat dilakukan melalui 3 model estimasi, yaitu model common effects, fixed effects atau random effects. Melalui ketiga model tersebut, dapat diketahui besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Namun dalam pemodelannya, setiap model estimasi memiliki asumsi terhadap intersep yang berbeda.

Model common effects mengasumsikan bahwa berbagai kurun waktu, perilaku kabupaten/kota dalam membentuk Kemandirian Keuangan Daerah adalah sama. Dengan demikian, intersep pada model estimasinya bernilai sama untuk semua kabupaten/kota. Sebaliknya model fixed effects mengasumsikan bahwa dalam berbagai kurun waktu, perilaku kabupaten/kota membentuk Kemandirian Keuangan Daerah adalah berbeda. Perbedaan ini tercermin oleh nilai intersep pada model estimasi yang berbeda untuk setiap kabupaten/kota.

Sama halnya dengan model fixed effects, model random effects mengasumsikan bahwa dalam berbagai kurun waktu, perilaku kabupaten/kota dalam membentuk Kemandirian Keuangan Daerah adalah berbeda. Hanya saja, intersep pada model fixed effects bersifat tetap, sedangkan pada model random effects, intersep bersifat acak/random (stokastik).

Ketiga model estimasi tersebut merupakan model estimasi Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur. Dari ketiga model estimasi tersebut, akan dipilih model estimasi terbaik.

Ordinary Least Square

Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil estimasi *common effects* model.



pemerintah pusat didominasi oleh Dana Alokasi Umum yaitu sebesar 72,74% dari Total Penerimaan Daerah.

Sesuai dengan penelitian Muliana (2009) yang dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Khusus juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, hal tersebut juga terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Besaran rata-rata prosentase Dana Alokasi Khusus yang didapat oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 12,23% dari Total Penerimaan Daerah.

Dana Bagi Hasil berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Jika dilihat dari data panel, terlihat bahwa nilai variabel dana bagi hasil cenderung kecil dibandingkan dengan variabel lainnya sehingga pengaruhnya tidak signifikan. Hasil ini tidak mendukung pernyataan Purwosusilo yang menyatakan bahwa variabel yang mempengaruhi secara signifikan terhadap kapasitas fiskal yaitu Bagi Hasil Pajak. Kondisi ini kemungkinan disebabkan karena kecilnya perolehan pajak dan sumberdaya alam yang ditarik oleh pemerintah daerah sehingga dana perimbangan termasuk didalamnya dana bagi hasil yang diserahkan kepada daerah menjadi kecil.

6. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN

a. Keterbatasan Penelitian

- 1) Penggunaan data sekunder laporan APBD hanya selama 5 tahun, dapat ditingkatkan untuk jangka waktu yang lebih panjang.
- 2) Penelitian ini menggunakan data sampel kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur mengingat adanya persamaan karakteristik. Oleh karena itu bisa jadi daya generalisasi penelitian ini cukup rendah.

b. Implikasi

1) Implikasi Teoritis

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan ketergantungan suatu daerah terhadap sumber dana dari luar. Semakin rendah rasio Kemandirian Keuangan Daerah berarti tingkat ketergantungan bantuan pihak luar (dalam hal ini terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil yang tinggi menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tingkat potensi sumber daya yang digali dan dikembangkan di daerah tersebut. Semakin tinggi pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil yang didapat setiap daerah menunjukkan tingginya Kemandirian Keuangan Daerah.

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Implikasi Manajerial

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah ditunjukkan dalam pembayaran pajak daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.



Bulan Negeri Ekowisata Indonesia (BNEI)
Cipta dan Nyalakan Lumbung Liris Fatah

PROSIDING

Simposium Riset Ekonomi VI - 2014



c. Rekomendasi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah :

- 1) Penelitian dapat menggunakan data sampel kabupaten/kota dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih luas, misal data dari beberapa provinsi atau bisa jadi dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
- 2) Dapat melibatkan lebih banyak variabel lain untuk menghitung Kemandirian Keuangan Daerah diluar variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

DAFTAR RUJUKAN

Ayu, Rifana, 2007. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Sumatera Utara". *Skripsi Universitas Sumatera Utara*. Medan



Kajian Survei Ekonomi Indonesia (KSEI)
Cahaya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

PROSIDING Simposium Riset Ekonomi VI - 2014



www.perbanas.ac.id

- Rinaldi Udin., 2012., "Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah". **Jurnal Eksos**, STIE Indonesia. Pontianak. Volume 8, Nomor 2, hal. 105.
- Rosmeli., 2010., "Analisis Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Jambi Tahun 2000 – 2008". **Jurnal Penelitian**, Universitas Jambi. Jambi. Volume 12, Nomor 2, hal 57.
- Susilo Purwo., 2009, "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah". Tesis. Universitas Stikubank. Semarang
- Subowo.Wati Endar Rosita., 2010., "Hubungan Antara PAD dan DANA Perimbangan dengan Belanja Modal Pemda Kudus". **Jurnal Dinamika Akuntansi**, Universitas Negeri Semarang. Semarang. Volume 2, No. 2, hal. 74
- Suparmoko. 2002. "Ekonomi Publik". ANDI. Yogyakarta
- Yunita, Dewi Anggra, 2008. "Pengaruh Rasio Efektivitas PAD dan DAU terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemkab/Pemko di Sumatera Utara". Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan